

# Peran Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dalam Mengurangi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Wilayah Binaan 1 (Andalas) Kota Padang

Salman Al Farisi<sup>1\*</sup>, Intan Slipilia<sup>2</sup>

Universitas Negeri Padang

\*Correspondence: Salman Al Farisi

Email: [salmanalfarisi1618@gmail.com](mailto:salmanalfarisi1618@gmail.com)

Received: 04-06-2025

Accepted: 16-07-2025

Published: 28-08-2025

**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam Mengurangi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Wilayah Binaan 1 (Andalas) Kota Padang. Fenomena anak tidak sekolah masih menjadi permasalahan serius dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga diperlukan intervensi melalui pendidikan nonformal seperti SKB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Pendidikan, pamong SKB, pihak kelurahan, orang tua, dan peserta didik. Analisis dilakukan menggunakan teori peran pemerintah menurut Gito Saputro (dalam Mustanir, 2020), yang meliputi peranan sebagai pemecah masalah, fasilitator, penghubung sistem, motivator, dan komunikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKB berperan penting dalam menyediakan akses pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, B, dan C serta pelatihan keterampilan praktis. Peran sebagai pemecah masalah dan fasilitator telah berjalan, namun belum optimal karena keterbatasan tenaga pamong belajar, minimnya dana operasional, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Peran sebagai penghubung sistem dan komunikator dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan, kelurahan, dan pamong SKB untuk mendata dan memotivasi ATS agar kembali belajar.

Meskipun menghadapi beberapa kendala, keberadaan SKB terbukti membantu mengurangi angka anak tidak sekolah dan mendukung pemerataan pendidikan di Kota Padang.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Sanggar Kegiatan Belajar, Anak Tidak Sekolah, Pendidikan Nonformal, Kota Padang

**Abstract:** This research aims to analyze The Role of the Learning Activity Center (Sanggar Kegiatan Belajar/SKB) in Reducing Out-of-School Children (Anak Tidak Sekolah/ATS) in Development Area 1 (Andalas) of Padang City. The phenomenon of out-of-school children remains a serious issue in human resource development; therefore, non-formal education programs such as SKB are needed as an intervention. This study employs a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants from the Department of Education, SKB instructors, local officials, parents, and learners. The analysis is based on Gito Saputro's theory of governmental roles (in Mustanir, 2020), which includes roles as a problem solver, facilitator, system connector, motivator, and communicator. The results show that SKB plays a significant role in providing access to equivalency education through Packages A, B, and C, as well as practical skill training. The roles of problem solver and facilitator have been implemented but are not yet optimal due to limited teaching staff, lack of operational funds, and low community participation. The roles of system connector and communicator are carried out through cooperation between the Education Department, local authorities, and SKB instructors to identify and motivate ATS to return to school. Despite several obstacles, the SKB program has proven effective in reducing the number of out-of-school children and supporting equitable access to education in Padang City.

**Keywords:** Government Role, Learning Activity Center, Out-Of-School Children, Non-Formal Education, Padang City

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan menjadi kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Waikero & Iswahyudi, 2019). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berusia tujuh hingga lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sebagai hak asasi manusia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena masih banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan secara layak (Kemendikbudristek, 2021).

Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud Tahun 2025, tercatat sebanyak 2.549 anak tidak bersekolah di Kota Padang, tersebar di sebelas kecamatan dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Koto Tangah sebanyak 499 anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan masih belum terpenuhi secara merata (Pusdatin Kemendikbud, 2025). Faktor utama penyebab Anak Tidak Sekolah (ATS) di antaranya adalah rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan dan keterbatasan ekonomi keluarga (Vanessa, 2021). Selain itu, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan formal tidak memberikan manfaat langsung bagi kehidupan ekonomi keluarga, sehingga anak lebih diarahkan untuk bekerja membantu orang tua daripada bersekolah.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berfungsi sebagai satuan pendidikan nonformal. SKB memberikan layanan pendidikan kesetaraan melalui program Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA), serta pelatihan keterampilan praktis yang dapat menunjang kemandirian ekonomi peserta didik (Munadifah, 2019). Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal dan diperkuat oleh Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SKB di Kota Padang.

Namun, implementasi program SKB di wilayah binaan 1 (Andalas) Kota Padang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan tenaga pamong belajar, minimnya dana operasional, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Padang (Wawancara, 17 April 2025), sekitar 71% anak tidak sekolah belum terverifikasi, sedangkan 29% lainnya baru dirujuk ke SKB untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program masih belum optimal dan memerlukan evaluasi mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam Mengurangi Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah binaan 1 (Andalas) Kota Padang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan nonformal di tingkat daerah serta memperkuat upaya pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam sesuai konteks lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam mengurangi Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah binaan 1 (Andalas) Kota Padang. Menurut Anggito dan Setiawan (2018), penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan realitas sosial secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah binaan 1 (Andalas) karena memiliki jumlah anak tidak sekolah tertinggi berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Padang (2025). Fokus penelitian diarahkan pada peran Program SKB dengan menggunakan lima indikator teori peran pemerintah menurut Gito Saputro dalam (Mustanir et al., 2020) yaitu sebagai pemecah masalah (*problem solving*), fasilitator, penghubung sistem, motivator, dan komunikator. Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang memahami permasalahan secara mendalam (Sugiyono, 2016), meliputi pejabat Dinas Pendidikan, pamong SKB, perangkat kelurahan, orang tua, dan peserta didik. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta sumber sekunder berupa literatur, laporan resmi, dan data kelembagaan (Miles & Huberman, 1984; Sugiyono, 2018). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap kegiatan SKB (Nasution, 2017), wawancara mendalam dengan informan kunci (Sugiyono, 2018), dan dokumentasi berupa arsip serta laporan kegiatan (Moleong, 2019). Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1983). Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil dari berbagai narasumber dan metode pengumpulan data (Sugiyono, 2015).

### **Hasil dan Pembahasan**

Peran Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah binaan 1 (Andalas) Kota Padang Berdasarkan Teori Gito Saputro (dalam, Mustanir 2020)

Berdasarkan hasil penelitian, peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di wilayah binaan 1 (Andalas) Kota Padang dalam mengurangi Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat dianalisis melalui lima indikator peran pemerintah menurut Gito Saputro dalam Mustanir (2020), yaitu sebagai pemecah masalah, fasilitator, penghubung sistem, motivator, dan komunikator.

1. Peran Sebagai Pemecah Masalah

Peran sebagai pemecah masalah (problem solving) terlihat dari upaya Dinas Pendidikan dan SKB dalam mengidentifikasi penyebab utama anak tidak sekolah seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, dan lemahnya dukungan sosial (Vanessa & Eriyanti, 2021). Partisipan diajak untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang didasarkan pada komunikasi terbuka dan keterlibatan aktif semua pihak. (Septian et al., 2024) serta budaya organisasi yang kokoh dapat menumbuhkan semangat inovasi serta mendorong anggota untuk menyelesaikan masalah dengan sikap yang tanggap dan inisiatif tinggi (Delipiter Lase, Yeni Absah, Prihatin Lumbanraja, Yohanes Giawa, 2025), sehingga SKB melakukan verifikasi data ATS bekerja sama dengan kelurahan dan RT/RW untuk mengetahui latar belakang setiap anak serta mencari solusi agar mereka dapat kembali memperoleh akses pendidikan.

2. Peran Sebagai Fasilitator

Peran sebagai fasilitator diwujudkan melalui penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yang setara dengan jenjang SD, SMP, dan SMA, serta pelatihan keterampilan praktis seperti menjahit, tata boga, dan tata rias yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan ekonomi mandiri (Munadifah, 2019). Peran ini berfokus pada bagaimana proses penyampaian informasi berlangsung, baik dari segi mutu maupun jumlah, antara pihak manajemen dan masyarakat (Anwar, 2015). SKB juga memfasilitasi bantuan perlengkapan belajar dan biaya ujian bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang dan lembaga sosial terkait.

3. Peran Sebagai Penghubung Sistem

Peran sebagai penghubung sistem dijalankan melalui koordinasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, kelurahan, sekolah formal, dan masyarakat dalam proses pendataan, pembimbingan, serta tindak lanjut terhadap anak yang telah terverifikasi sebagai ATS (Mustanir et al., 2020). Pemerintah daerah melalui SKB berfungsi sebagai jembatan penghubung agar setiap pihak memiliki peran aktif dalam menekan angka ATS.

4. Peran Sebagai Motivator

Peran sebagai motivator diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan. Pamong belajar SKB bersama petugas Dinas Pendidikan secara rutin mengunjungi rumah-rumah warga dan mengadakan kegiatan pembinaan moral serta motivasi bagi anak-anak yang sempat berhenti sekolah agar mereka memiliki semangat belajar kembali (Gito Saputro dalam (Mustanir et al., 2020)

#### 5. Peran Sebagai Komunikator

Peran sebagai komunikator dilaksanakan melalui penyebaran informasi mengenai program pendidikan kesetaraan, manfaat belajar di SKB, serta peluang kerja bagi lulusan melalui media sosial, grup WhatsApp komunitas, dan kegiatan kehumasan di lingkungan kelurahan. Fungsi komunikasi dua arah ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program SKB dan meningkatkan partisipasi ATS yang sebelumnya enggan bersekolah.

Pelaksanaan kelima peran tersebut menunjukkan bahwa SKB berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka ATS di Kota Padang meskipun masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan dana, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Hasil ini sejalan dengan pandangan Soekanto (2004) bahwa keberhasilan peran pemerintah dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan menjalankan fungsi sosial dan administratif secara seimbang. Dengan demikian, program SKB berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang memperkuat pemerataan akses pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di daerah.

### **Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian ini konsisten dengan:

1. (Weni, 2020) di Kota Samarinda: Analisis Proses Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda.
2. (Marnia et al., 2021) di Kabupaten Padang Pariaman: Persepsi Siswa Tentang Pengelolaan Pembelajaran Oleh Pamong Belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Padang Pariaman
3. (Salmia dkk et al., 2024) di Kabupaten Muna: Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Remaja Putus Sekolah Di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorumba Selatan a h.
4. (Vanessa, 2021) di Kota Padang: Faktor-faktor Penyebab Anak Nelayan Putus Sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

5. (Rizqah et al., 2024) di Kabupaten Sidenreng Rappang: Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

Temuan penelitian ini berimplikasi pada efektivitas Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tidak hanya bergantung pada penyediaan layanan pendidikan kesetaraan, tetapi juga pada mekanisme pembinaan dan motivasi belajar yang berkelanjutan agar peserta didik dapat terus melanjutkan pendidikannya. Temuan baru penelitian ini yaitu penegasan lima indikator peran pemerintah menurut Gito Saputro dalam konteks pengelolaan SKB, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

#### Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori peran pemerintah yang dikemukakan oleh Gito Saputro (2015), yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki lima peran utama dalam pelaksanaan kebijakan publik, yaitu sebagai pemecah masalah, fasilitator, penghubung sistem, motivator, dan komunikator.

Secara praktis, rekomendasi yang diajukan meliputi:

1. Meningkatkan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar nonformal agar pelaksanaan program lebih optimal.
2. Mendorong kolaborasi antara SKB dengan lembaga pendidikan formal dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan sasaran program pendidikan kesetaraan.
3. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tutor melalui pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kualitas pembelajaran di SKB.
4. Mengembangkan sistem pembinaan dan pengawasan yang lebih terstruktur terhadap peserta didik agar tidak kembali menjadi Anak Tidak Sekolah (ATS).
5. Memperkuat fungsi SKB sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

Dari seluruh variabel yang dianalisis, terlihat bahwa peran Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan pendidikan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara menyeluruh untuk mendukung keberlanjutan pendidikan nonformal. Hambatan yang ditemukan bersifat kelembagaan dan sumber daya, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pengawasan berkelanjutan agar peran SKB dapat dijalankan secara optimal dan tepat sasaran. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan teori peran pemerintah dalam konteks pendidikan nonformal. Secara praktis, temuan ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk

memperkuat kebijakan pengentasan Anak Tidak Sekolah melalui optimalisasi peran SKB di Kota Padang.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki peran strategis dalam menekan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Wilayah Binaan 1 (Andalas) Kota Padang. Berdasarkan teori peran pemerintah menurut Gito Saputro, peran SKB tercermin melalui lima indikator utama, yaitu sebagai pemecah masalah, fasilitator, penghubung sistem, motivator, dan komunikator. Melalui peran tersebut, SKB berkontribusi dalam penyediaan akses pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan tenaga pamong belajar, kurangnya sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hambatan tersebut menunjukkan perlunya strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program lebih optimal.

Implikasi Penelitian Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan SKB bukan hanya berperan dalam penyediaan layanan pendidikan nonformal, tetapi juga memiliki implikasi penting terhadap pemerataan akses pendidikan dan penguatan literasi masyarakat di tingkat lokal. SKB dapat menjadi model implementasi kebijakan pendidikan inklusif dan adaptif yang relevan diterapkan di daerah lain dengan karakteristik serupa. Rekomendasi dan Saran Penelitian Selanjutnya Rekomendasi praktis Pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan terhadap SKB melalui peningkatan anggaran, penyediaan tenaga pendidik profesional, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan nonformal. Selain itu, kerja sama antara SKB, sekolah formal, dan lembaga sosial perlu diperluas agar proses penjangkauan ATS lebih efektif. Saran penelitian selanjutnya Dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas model pembelajaran dan strategi pemberdayaan yang diterapkan SKB, serta analisis komparatif antar wilayah binaan untuk melihat faktor keberhasilan dan tantangan dalam menekan angka ATS.

### **Daftar Pustaka**

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anwar, R. (2015). Peran Praktisi Public Relations Dalam Organisasi-Organisasi Di Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi Islam*, 7(1), 46–55.
- dan Anak. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Delipiter Lase, Yeni Absah, Prihatin Lumbanraja, Yohanes Giawa, Y. G. (2025). Teori Budaya Organisasi\_ Konsep, Model, dan Implikasi untuk Manajemen Organisasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 21–45.

- Gito Saputro, S., & Rangga, R. K. 2015. Pengembangan dan Pemberdayaan
- Marnia, W., Jasrial, J., Rusdinal, R., & Rifma, R. (2021). Persepsi Siswa Tentang Pengelolaan Pembelajaran Oleh Pamong Belajar Di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Padang Pariaman. *Journal of Educational Administration and Leadership*, 2(2), 222–230. <https://doi.org/10.24036/jeal.v2i2.165>
- Masyarakat Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1983). *Drawing Valid Meaning from Qualitative Data : Toward a Shared Craft*.
- Munadifah, S., & Lestari, G. D. (2019). Peran Pengelola Skb Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Tutor di Sanggar Kegiatan Belajar. *Jurnal Pendidikan untuk Semua*, 1(1).
- Mustanir, A., S, F., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 84–108. <https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.8>
- Nasution, M. K. (2018). Penggunaan Metode Pembelajaran Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa. *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11(01), 9–16. Retrieved from <https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/studiadidaktika/article/view/515>
- Penerbitdeependublish.com. (2025). *Tingkat Anak Tidak Sekolah*. Diakses pada 25 September 2025, dari <https://pusdatin.kemendikdasmen.go.id/>
- PT Alfabet
- Rizqah, M., Dema, H., & Barisan, B. (2024). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Public Administration and Government Journal*, 4(1), 119–126. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i1.23>
- Septian, E., Wulandari, S., Islamiyah, D. T., & Nurizzakiya, E. L. (2024). Pelatihan Manajemen Konflik Dalam Pemecahan Masalah Secara Konstruktif Melalui Pengembangan Organisasi Siswa Intra Sekolah. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 172–184. <https://doi.org/10.53621/jippmas.v4i2.362>
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga; Tentang ikhwal Keluarga, Remaja*
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vanessa, F. E. (2021). Faktor faktro Penyebab Anak Nelayan Putus Sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu*

Administrasi Publik (JMIAP), 3(2), 100–108.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i2.218>

Waikero, S., & Iswahyudi, D. (2019). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen, 3(2000), 256–263.  
<https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>

Weni, T. (2020). Analisis Proses Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda. Papatudzu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan, 16(2), 89.  
<https://doi.org/10.35329/fkip.v16i2.1765>

Yogyakarta: Graha Ilmu.